

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Greenpeace Australia sebagai NGO Internasional yang bergerak dalam masalah lingkungan sudah banyak berperan di banyak wilayah pasifik, termasuk menghentikan importasi limbah berbahaya dan lain-lain, berkampanye melawan melobi pemerintah mengenai isu-isu energi berkelanjutan dan menyoroti bahaya limbah pembakaran. Seringkali bersama dengan kelompok-kelompok lokal lainnya, *Greenpeace* telah menggalang dan melobi pemerintah Australia untuk mengeluarkan kebijakan yang berwawasan lingkungan dalam arti *Greenpeace* mampu mempengaruhi pemerintah Australia dalam pembuatan regulasi dan kebijakan public terhadap masalah lingkungan di Australia. Salah satu pengaruh usulan *greenpeace* yang mempengaruhi kebijakan adalah keluarnya peraturan mengenai pencegahan dan tata cara pengelolaan hutan akibat kebakaran yang sering melanda Australia.¹

Kegiatan *Greenpeace* Australia dan pasifik sendiri membuat Perdana Menteri Australia Kevin Rudd telah banyak melakukan perubahan dan kebijakan menyatakan sedikitnya ada beberapa kredibilitas. *Greenpeac* memberikan bukti-bukti baru penghancuran hutan kepada publik, media dan juga pemegang saham. Bukti-bukti yang dikumpulkan sejak Rudd menduduki jabatan Perdana Menteri di umumkan di konferensi pers sebelum di mulainya rapat dengan Senat Australia Untuk mendapatkan bukti baru itu tentu tidak mudah. *Greenpeace* disini mampu dan berada sebagai *pressure group* (kelompok penekan) bagi Pemerintah

¹ "Law National Product Safety" dalam <http://www.australia.gov/regulation/2009>, diakses 15 November 2009

Australia. Salah satu keputusan untuk yang diambil Ruud adalah melaksanakan suatu skema perdagangan emisi dan memenuhi tujuan Protokol Kyoto. Kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan lokal maupun lingkungan global. Sepertinya jelas bahwa pemerintah Australia akan selalu membuat kebijakan sejalan dengan agenda dan tujuan Australia. Yang dalam jangka panjang pembangunan dan perkembangan ekonomi biaya tinggi akan mengabaikan konservasi akan jauh lebih besar dibanding jangka pendek.

B. Latar Belakang Masalah

Greenpeace merupakan NGO (Non Government Organization) internasional yang bergerak dalam bidang lingkungan. Salah satu perjuangan *Greenpeace* adalah menyelamatkan lingkungan dunia. *Greenpeace* adalah suatu organisasi lingkungan global yang didirikan di Vancouver, British Columbia, Kanada pada tahun 1971. *Greenpeace* dikenal menggunakan aksi langsung tanpa kekerasan, konfrontasi damai dalam melakukan kampanye untuk menghentikan pengujian nuklir angkasa dan bawah tanah, begitu juga dengan penghentian kampanye penangkapan ikan paus besar-besaran.²

Pada pertengahan tahun 1980 *Greenpeace* telah berkembang dari organisasi biasa menjadi sebuah organisasi dengan penghasilan melebihi US\$ 100 juta pertahun, mempunyai kantor di 21 negara dan lebih dari 100 kampanye di seluruh dunia, kini menangani limbah beracun, hujan asam, penambangan uranium dan pengambilan ikan dengan jala apung demikian juga isu-isu orisinil. *Greenpeace*

² "Greenpeace dan Lingkungan" dalam <http://www.id.wikipedia.org/wiki/greenpeace>, diakses 24 Oktober 2008

telah memenangkan masyarakat umum pada demokrasi industri. Para pemimpin negara telah membicarakan lingkungan setiap saat.

Pernyataan resmi misi *Greenpeace* menyebutkan bahwa *Greenpeace* adalah organisasi independen yang berkampanye menggunakan konfrontasi kreatif, anti kekerasan untuk mengungkap permasalahan lingkungan global dan untuk memaksa solusi bagi sebuah masa depan yang damai dan hijau. Target *Greenpeace* adalah untuk memastikan kemampuan bumi untuk kelangsungan hidup bagi semua keanekaragamannya.³ Beberapa program kampanye *Greenpeace* misalnya adalah perubahan iklim, melindungi hutan alam terakhir di dunia, dan akhir dari zaman nuklir.⁴

Berdasarkan pada sedikit uraian dan tujuan dari *Greenpeace*, maka *Greenpeace* dapat dikategorikan sebagai sebuah kelompok Penekan (*interest group*). Kelompok Penekan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok Penekan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintahan secara langsung. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum. Kelompok Penekan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan.⁵

Greenpeace berkomitmen untuk mengembangkan keberadaan Australia pada akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990, dan *Greenpeace* membuka kantor

³ *Ibid.*

⁴ "Greenpeace kecewa terhadap target penurunan emisi gas dunia" dalam <http://www.greenpeace.org/seasia/id/campagins>, diakses 24 Oktober 2008

⁵ Michel G Roskin. Et.al., *Political Science An Introduction*, Prentice hall, New Jersey, 2000, hal. 169

pertamanya di Jepang (1989) dan kemudian di Australia (1990). Penjajakan awal juga dilakukan di beberapa negara Asia Tenggara dengan fokus utama pada negara-negara yang memiliki perairan yang luas dan hutan tropis, dimana sumber daya alam tersebut harus dijaga agar tidak merugikan publik.

Greenpeace sendiri telah sukses berkampanye di negara-negara industri untuk mengurangi dan menghapuskan polusi dan degradasi lingkungan. Usaha-usaha dan capaian ini dapat dengan mudah diputarbalikkan padasaat perusahaan-perusahaan multinasional tersebut tetap mengekspor teknologi kotor yang mengakibatkan penurunan dampak lingkungan di wilayah ini. Dengan demikian, setelah penjajakan bertahun-tahun dan berkampanye di negara-negara kunci, akhirnya *Greenpeace* berhasil membuka kantor di wilayah ini. *Greenpeace* Australia dan Pasifik sendiri mendukung adanya kampanye-kampanye dan menarik sukarelawan-sukarelawan untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan.

Sebuah kebijakan bukanlah sesuatu yang langsung begitu saja diputuskan dari pemerintah. Dalam penentuan sebuah kebijakan memerlukan proses panjang, melibatkan banyak aktor, munculnya dinamika serta diskursus di dalamnya dan yang paling penting adalah sebuah tujuan tertentu. Hal inilah yang dimaksud oleh Carl Frederich, bahwa kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap

kebijakan yang diusahakan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.⁶

Upaya Greenpeace Australia dalam memerangi para “perusak” lingkungan tidak hanya di dalam negrinya saja namun juga yang menyangkut permasalahan yang berhubungan dengan negara-negara lain dalam wilayah teritori Australia sendiri. Salah satu permasalahan Greenpeace adalah para nelayan Jepang berada dalam perburuan paus besar-besaran. Bahkan, pihak oposisi keras Australia menuntut agar perburuan ini segera dihentikan, bila perlu menggunakan kekuatan militer.

Mengacuhkan peringatan aliansi Barat yang bisa membakar perselisihan atas pemburuan paus, Jepang pada Minggu lalu mengirimkan armadanya menuju Lautan Antartika. Yang membuat terkejut banyak pihak adalah pemburuan kali ini termasuk mencari jenis paus langka humpback. Sebuah kapal pecinta lingkungan milik Greenpeace mencoba melacak enam armada kapal pemburu di tengah kecaman dari Australia, Inggris dan New Zealand.

Jepang yang berdalih makan daging paus sebagai bagian dari budaya mereka, berencana membunuh 950 paus dalam misi selama lima bulan. Jepang sedikit cerdas karena setiap kali perburuan, mereka selalu berlindung di bawah kelemahan moratorium global yang mengizinkan pemburuan dilakukan untuk “penelitian”.

PM Kevin Rudd tidak setuju dengan pemburuan paus, namun menolak untuk mengerahkan militer. Hideki Moronuki, kepala pemburuan Badan

⁶ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004, hal. 17 - 18.

Perikanan Jepang, tak ambil pusing oleh ancaman oposisi Australia. Penelitian paus yang dilakukan Jepang dilakukan 100 persen berdasarkan perjanjian International Whaling Commission, jadi pengerahan militer tidak mungkin dilakukan. Kapal Espernaza milik kelompok lingkungan Greenpeace terus mencoba menemukan armada pemburu, namun mengalami kesulitan karena mereka menyembunyikan peralatan identifikasi. Paus humpback dilindungi di bawah moratorium internasional 1996 setelah bertahun-tahun populasinya merosot tajam karena perburuan. Mereka terkenal karena nyanyian yang rumit dan akrobat yang menarik⁷

Dalam kaitannya dengan *Greenpeace*, maka kebijakan publik yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kebijakan publik yang terkait dengan lingkungan. Kebijakan lingkungan adalah sebuah kebijakan tentang penataan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap lingkungan. Kebijakan lingkungan sangat penting bagi kelestarian kehidupan manusia. Dalam hal ini adalah kepedulian negara sebagai otoritas tertinggi dalam membuat kebijakan-kebijakan dan regulasi-regulasi yang peduli pada kelestarian lingkungan.

Salah satu isu lingkungan di Australia yang populer baru-baru ini adalah kebakaran yang sempat mengepung wilayah negara tersebut. Jika melihat rekaman media, maka kebakaran bukanlah hal yang baru bagi Australia. Beberapa Media dunia misalnya menyebut Australia sebagai benua yang mudah terbakar. Secara alami benua Australia itu memang paling mudah dijilat api dibandingkan dengan benua lainnya di dunia. Iklim yang kering dan gelombang panas yang

⁷ *Ibid.*

sesekali singgah, ditambah dengan vegetasi semak dan hutan pohon eukaliptus yang kaya minyak, membuat api adalah bagian intrinsik dari landscape negeri benua itu. Buku-buku sejarahpun mendukung teori hubungan lekat antara Australia dengan api. Teori tersebut dapat dilihat mulai dari awal, yakni ketika pendudukan oleh warga kulit putih di mulai di benua ini sampai dengan peristiwa “Rabu Abu” pada tahun 1983. Dalam kebakaran 19 tahun lalu korban jiwa mencapai 75 orang dan jumlah rumah yang terbakar sebanyak 2.300 rumah. Sebanyak 71 orang lainnya mati terpanggang dalam “Jum’at Hitam” pada tahun 1939. Diantara dua peristiwa tersebut, masih ada kebakaran hutan lainnya yang menelan korban jiwa 22 orang (1969), dan 62 orang tewas (1967). Kering dan banjir begitu sastrawan penulis posisi Dorothy McKeller melukiskan negaranya.⁸

Dalam bidang lingkungan hidup, kebijakan Rudd pun banyak mendapat simpati dari *Greenpeace*. Beberapa jam setelah dilantik pada 3 Desember 2008, Rudd menandatangani Protokol Kyoto untuk upaya memerangi perubahan iklim secara domestik dan dengan komunitas internasional. Peran dia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bali tahun 2007 menjadi semakin penting.

Kebijakan pemerintah Australia lain yang berkaitan dengan *Greenpeace* adalah isu skema pengurangan polusi karbon (CPRS). Harian *Republika* menyebutkan memberitakan bahwa kelompok pencinta lingkungan, *Greenpeace* Australia menuding Perdana Menteri Kevin Rudd telah “berkhianat” pada ilmu

⁸ “Kebijakan Lingkungan dan Permasalahannya” dalam [http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/11/ilmu dan teknologi/km 20090211.01](http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/02/11/ilmu%20dan%20teknologi/km%20090211.01) diakses 24 Oktober 2009

pengetahuan dan generasi mendatang negaranya akan skema pengurangan polusi karbon (CPRS) yang diumumkan hanya mematok target pengurangan emisi lima persen. *Greenpeace* regional Australia-Pasifik, menggelar demonstrasi di sejumlah kota di Australia sebagai tindakan ungkapan kekecewaan organisasi ini pada target pengurangan emisi pemerintahan Rudd pada tahun 2020 yang sangat jauh di bawah target 25 hingga 50 persen yang disepakati kelompok negara maju di Bali Desember 2007.

Kegiatan *Greenpeace* Australia yang berlangsung terus menerus untuk mengkampanyekan masalah lingkungan baik Internasional, regional dan lokal membuat Perdana Menteri Australia Kevin Rudd melakukan perubahan dan kebijakan lingkungan di negaranya. *Greenpeace* berada sebagai *pressure group* (kelompok penekan) bagi Pemerintah Australia untuk menggulirkan kebijakan yang memang harus memandang bahwa lingkungan bukan milik kita tapi milik generasi berikutnya. Salah satu keputusan untuk yang diambil Rudd adalah melaksanakan suatu skema perdagangan emisi dan memenuhi tujuan Protokol Kyoto. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah Australia bagaimana pemerintah sangat peduli terhadap lingkungan lokal maupun lingkungan global. Sepertinya jelas bahwa pemerintah Australia akan selalu membuat kebijakan. Tujuan Pemerintah Australia yang dalam jangka panjang dalam pembangunan lingkungan terus di kawal dan disupport oleh *Greenpeace*

Komitmen Rudd dalam mengatasi perubahan iklim kembali ia tunjukkan dalam kunjungan ke beberapa negara yang mendukung perubahan iklim. Pemerintah Australia sepakat menjalin kerja sama secara serius untuk mengatasi

dampak perubahan iklim dan mengurangi tingkat emisi karbon di beberapa negara tersebut. Kesepakatan itu dituangkan dalam kerja sama kemitraan di bidang kehutanan untuk mengatasi emisi karbon yang ditandatangani oleh pemimpin beberapa negara dan Perdana Menteri Kevin Rudd. Kerja sama bidang lingkungan ini bisa menjadi satu wahana untuk mempererat hubungan Australia di masa kini dan mendatang. Sebab, persoalan perubahan iklim telah menjadi masalah global yang serius dan membutuhkan keterlibatan semua pihak.

Kebijakan pajak super besar bagi pertambangan itu bagi kalangan industri dinilai tidak adil dan berpotensi menyebabkan pengurangan tenaga kerja hingga berkurangnya investasi di sektor yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Australia ini. Perdana Menteri Kevin Rudd menjelaskan jelaskan kepada kalangan perusahaan tambang bahwa pemerintah Australia harus bisa membatasi penggunaan barang tambang bagi kepentingan Industri, demi menjaga lingkungan dan persediaan bagi kelangsungan generasi berikutnya.

Pemerintah Australia menerapkan banyak sekali peraturan yang mengatur tentang perlindungan ekosistem laut. Misalnya peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang Undang konservasi Keanekaragaman Hayati,⁹ pemerintah Australia menggunakan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati untuk melindungi dan mengelola spesies yang terancam, migrasi dan spesies laut. Contoh spesies laut yang di lindungi adalah pas, lumba-lumba, duyung, ikan laut dan muara, kura-kura laut, anjing laut dan singa laut dan masih banyak lagi.

⁹"Australian government", www.environment.gov.au diakses tgl 27 Pebruari 2011

Pemerintah Australia juga mengeluarkan Undang Undang untuk melindungi kelangsungan hidup Terumbu karang, terumbu karang di Australia merupakan salah satu terumbu karang terbesar di dunia. Terumbu karang tersebut merupakan tempat tinggal bagi banyak spesies laut di Australia.

Perlindungan terhadap Terumbu karang di atur dala Great Barrier Reef Marine Park Act 1975,¹⁰ yaitu peraturan yang mengatur tentang serangkaian tindakan yang di usulkan untuk memperkuat hukum, tata kelola dan kerangka kebijakan yang berkaitan denan manajemen dan perlindungan jangka panjang. Untuk mengurangi dan mencegah polusi laut pemerintah Australia mengeluarkan peraturan Sea Dumping Act 1981,¹¹ yaitu peraturan yang mengatur tentang pembakaran limbah di laut dan Sea Dumping 1986 (perubahan Undang-Undang) tentang pembuangan limbah di laut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat ditarik menjadi rumusan masalah adalah : Bagaimana peran *Greenpeace* dalam mempengaruhi kebijakan Lingkungan di bawah kekuasaan Perdana Menteri Kevin Rudd (tahun 2007-2010) ?

D. Kerangka Pemikiran

Sistem Politik Australia

Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada tradisi demokrasi liberal, termasuk di dalamnya toleransi beragama, dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Bentuk dan pelaksanaannya mencerminkan model pemerintahan

¹⁰ "aust gov", ibid

¹¹ "aust gov" ibid

Inggris dan Amerika namun tetap khas Australia. Persemakmuran Australia didirikan pada 1 Januari 1901, yang disebut juga Hari Federasi ketika enam bekas koloni Inggris, sekarang adalah keenam negara bagian Australia setuju untuk berserikat. Konstitusi Australia, yang pertama kali berlaku pada 1 Januari 1901, meletakkan dasar-dasar sistem pemerintahan Australia.

Konstitusi Australia menetapkan peraturan dan tanggung jawab pemerintah serta menjabarkan wewenang dari ketiga cabang pemerintahan - legislatif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif berisi parlemen - yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat.

1. Pemerintahan Persemakmuran/ Federasi atau Pemerintah Pusat

Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar: House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggungjawab menetapkan UU berskala nasional seperti: perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum sebelum menjadi UU/Peraturan Pemerintah.

DPR (House of Representatives), mengusulkan sebagian besar rancangan UU/Peraturan Pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih

melalui pemilu, di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di majelis rendah berhak membentuk pemerintahan.

2. Pemerintah Negara Bagian dan Teritori

Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundangan-undangan (akta parlemen) sendiri (yang dapat diamandemen parlemen setempat) tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara.

Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah Federasi berlaku di atas wewenang UU/Peraturan negara bagian. Semua Parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat bikameral yakni mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi. Sementara parlemen dari dua teritori (*Northern Territory* dan *Australian Capital Territory*) hanya memiliki satu majelis.

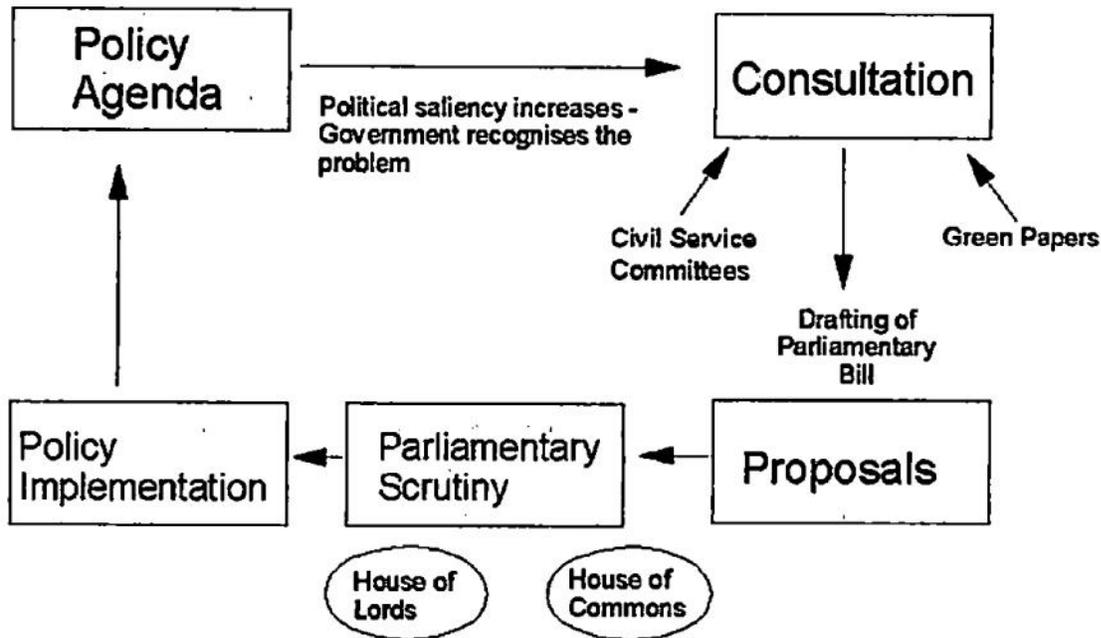
merintah negara bagian dan teritori menangani masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan publik, perangkat kepolisian, pemadam kebakaran dan pelayanan ambulans, serta keberadaan pemerintah lokal dalam wilayahnya masing-masing.

Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di Australia. Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-masing.

Beberapa badan pemerintah lokal bertanggungjawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan energi, kebanyakan negara bagian menetapkan besar tarif bea dan menerima dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Tanggungjawab pemerintah lokal secara khusus meliputi perencanaan/tata kota, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran pembuangan dan drainase, pelayanan sampah dan kebersihan dan fasilitas hiburan masyarakat.

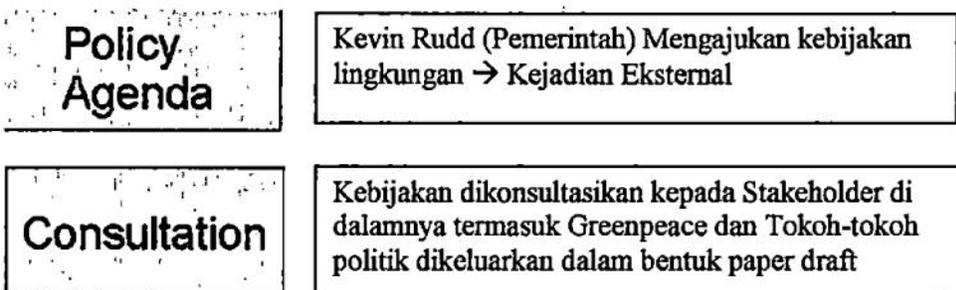
Pemerintah Federasi dan negara bagian menjalin kerjasama di berbagai bidang, yang secara resmi merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori; seperti pendidikan, perhubungan, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak pendapatan ditarik secara federal, dan debat di antara semua tingkat pemerintahan negara bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan merupakan ciri lama politik Australia

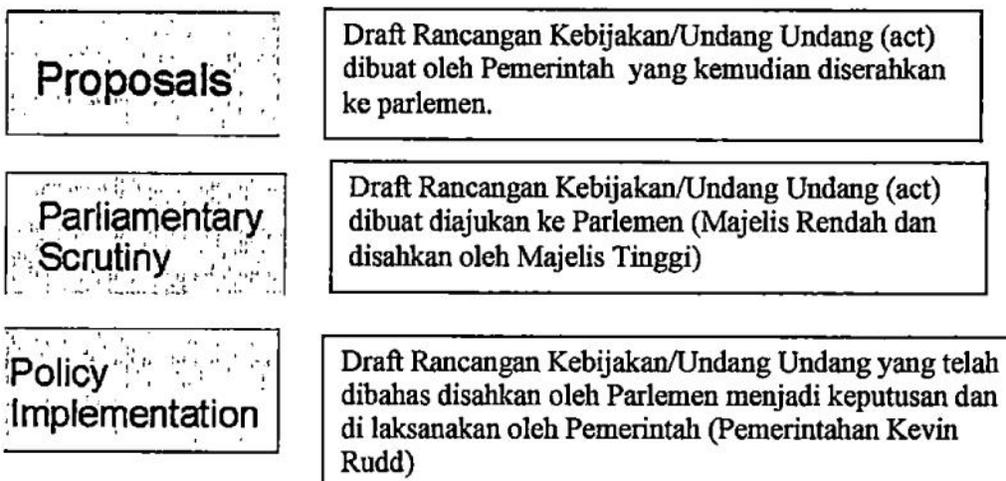
Dalam menggunakan teori yang kedua ini akan digambarkan melalui proses pembuatan keputusan dalam suatu sistem politik di suatu negara dengan memegang konsep yang disebut Mesin Ideal Imajiner Pembuat Kebijakan (MIIPK) yang dibuat oleh John Lovell. Dimana konsep ini berfungsi sebagai patokan untuk menjelaskan proses pembuatan keputusan politik luar negeri dalam praktek nyata, yaitu dengan penjelasan sebuah bagan sebagai berikut :

Gambar 1. Konsep *Pressure Group* John Lovell

Sumber : http://tutor2u.net/politics/content/topics/pressure_groups/pressure_functions.htm

Pada gambar 1 di atas agenda kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintahan dalam hal ini pemerintahan PM Kevin Rudd di konsultasikan kepada stakeholder melalui konsultasi. Pada tahapan konsultasi ini berbagai pihak termasuk kelompok kepentingan seperti greenpeace dapat memberikan masukan mengenai kebijakan yang belum masuk dalam draft rancangan kebijakan.





Setelah menjadi sebuah proposal/draft rancangan undang undang atau rancangan kebijakan maka Proposal kemudian di bahas di tingkat parlemen. Selanjutnya melalui mekanisme pembahasan akan diteliti dan dibahas dengan seksama oleh parlemen pada tingkat majelis rendah (*house of commons*) dan majelis tinggi (*house of lords*).

Rancangan kebijakan yang sudah di bahas pada *Parliamentary scrutiny* oleh majelis rendah dan majelis tinggi kemudian disahkan menjadi sebuah kebijakan yang kemudian diimplementasikan oleh pemerintah. Demikian seterusnya kemudian menjadi sebuah agenda pemerintah yang harus dilaksanakan.

Sebuah ilustrasi dari proses pembuatan kebijakan ditampilkan dalam grafik di atas. Kelompok Penekan dapat terlibat dalam mempengaruhi dan membentuk kebijakan publik pada titik-titik yang berbeda.. Misalnya, kelompok penekan dapat berusaha untuk mengangkat isu-isu agenda politik.. Hal ini dapat mempercepat proses reformasi politik yang mungkin sudah dalam benak pemerintah atau oposisi. Kelompok penekan dapat dibawa ke dalam proses

konsultasi (lihat perbedaan antara orang dalam dan kelompok tekanan dari luar) dan mungkin memiliki dampak ketika mencapai tahap penyusunan di Parlemen.

Pada gambar di atas posisi Greenpeace sebagai kelompok penekan berada dalam *consultation*. Posisi greenpeace bukan sebagai penentu dan pengambil kebijakan dalam masalah lingkungan namun sebagai lembaga independent yang mempunyai kepentingan. Segala permasalahan kebijakan lingkungan Australia seharusnya harus dikonsultasikan oleh pressure group yang berkepentingan.

Tabel 1 Posisi Kelompok Penekan (*Pressure Group*)

INPUT	SCANNING, CODING	TRANSMISI	REFERENSI	OUTPUT
Kejadian Eksternal	Sumber-sumber intelegen	Komisi Parlemen	Badan-badan pembuat Keputusan tertinggi	Keputusan
Keputusan Tuntutan Opini	Kelompok kepentingan Kelompok Penekan	Birokrasi sipil, militer		Penetapan Alokasi Sumber daya
Kebutuhan Kepentingan Internal	Partai Politik Media Massa			Komunikasi, Koordinasi

Sumber: Memory Storage and Recal¹²

Pada Tabel 1 di atas ruang kelompok penekan (*pressure group*) yakni Greenpeace melakukan tuntutan maupun menggunakan opini dengan media dan birokrasi (pemerintah negara bagian, pemerintah federal, majelis rendah, majelis tinggi dan juga melalui parlemen (*house of representative*) serta melalui partai politik yang ada untuk memenuhi kepentingan dalam kebijakan lingkungan di Australia.

¹² Mochtar Mas' oed, Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi (PAU-SS UGM: 1989), hlm. 127

Melalui media, yakni dengan menggunakan media cetak, elektronik dan media luar ruang seperti poster, banner dan sebagainya. Melalui birokrasi dilakukan kepada birokrat (menteri-menteri yang mendukung perjuangan *Greenpeace*). Melalui parlemen lewat tokoh-tokoh mereka yang duduk di majelis rendah maupun majelis tinggi. Serta melalui kelompok-kelompok penekan maupun kelompok kepentingan seperti universitas/perguruan tinggi dan tokoh LSM Lingkungan Australia.

Kelompok penekan merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Pada mulanya, kegiatan kelompok-kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi mengubahnya menjadi *pressure group*.¹³

Pada tingkat sosial horisontal, belum terdapat kesepakatan tentang isu-isu di atas, walaupun secara substansial nilai-nilai di atas telah perjuangkan oleh sebagian kelompok penekan dalam "bahasanya" yang lain. Perbedaan ini membawa kepada sirkumstansi sosio-politico-kultural yang dinamis karena terjadinya tarik ulur koalisi visi pada tingkat taktis, strategis maupun ideologis.

Proses demokratisasi sendiri sangat jelas didorong oleh kelompok-kelompok penekan yang berasal dari beragam kalangan di masyarakat, beberapa di antaranya adalah, lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga-lembaga penelitian swadaya masyarakat, media massa, organisasi-organisasi

¹³ Bambang S dan Sugianto. 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surakarta:Penerbit Graha, hlm 176

kemahasiswaan di lingkungan internal dan eksternal kampus, organisasi-organisasi kepemudaan, lembaga-lembaga serikat buruh, partai-partai politik, dan lain sebagainya.

Jumlah kelompok penekan yang beragam ini dapat bertambah banyak manakala setiap kelompok di masyarakat menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya melalui asosiasi atau kelompok yang begitu bebas didirikan dan begitu bebas bersuara. Kelompok-kelompok penekan bertambah banyak dan bertambah intensif sehubungan dengan kondisi politik yang tidak menentu masa itu.

Semua persoalan mengemuka tanpa filter dan semua diakomodasi oleh kelompok-kelompok penekan yang telah marak bermunculan. Tidak mustahil energi sosial bangsa ini akan melemah sendiri karena begitu banyaknya persoalan bangsa yang mengemuka dan yang sebelumnya tersimpan di bawah permukaan seperti gunung es (*iceberg*). Beberapa justifikasi yang sering kita dengar sehubungan dengan fenomena ini adalah normal-normal saja sebagai konsekuensi logis dari proses demokratisasi yang berlangsung.

Dari titik pijak persoalan ini, peran kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*) pada dasarnya telah membuka wacana pendewasaan politik yang riil, dengan tetap diiringi oleh kelompok-kelompok politik yang lain, yang juga dapat berperan tidak hanya sebagai kekuatan penekan (*pressure forces*), tetapi juga

kendali sosial (*social control*), pendidikan politik (*political education*) dan pembangunan kesadaran (*awareness building aspect*).¹⁴

Kelompok penekan memiliki beberapa type, dalam kaitannya dengan kelompok seperti Greenpeace ini masuk dalam type *Promotional*. Kelompok penekan ini iasanya aktif dalam masalah ekologi (kelompok lingkungan hidup), kelompok anti pornografi dan lain-lain.¹⁵

Interaksi antara kelompok-kelompok adalah merupakan kenyataan politik. Individu-individu yang memiliki Penekan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal kedalam kelompok Penekan (*interest group*) yang dapat mengajukan dan memaksakan Penekan-Penekannya kepada pemerintah. Hogue mengartikan kelompok Penekan sebagai suatu kelompok yang memiliki sikap yang sama yang mengajukan tuntutan-tuntutan terhadap kelompok yang lain dalam masyarakat. Dan kelompok Penekan itu akan mempunyai arti politis, kalau kelompok Penekan itu mengajukan tuntutan terhadap suatu lembaga pemerintahan.

Kelompok Penekan semakin mempunyai arti yang penting dalam proses dan kegiatan politik. Dan sebenarnya politik itu adalah merupakan perjuangan diantara kelompok-kelompok untuk mempengaruhi kebijaksanaan negara. Menurut teori kelompok, kebijaksanaan negara itu adalah merupakan pertimbangan yang dicapai sebagai hasil perjuangan kelompok. Untuk menjaga perimbangan tersebut maka tugas atau peranan sistem politik adalah menengahi

¹⁴ Rod Hogue, Martin Harrop, Shawn Breslin, ,1988, *Comparative Governmnet and Politics: an introduction (4th edition)*: New Jersey: Prantice Hall. Hal 113.

¹⁵ Blondel dalam Rob Hogue, 1998, *Comparative Government an d Politics an introduction*, London : Mc Millan Press

konflik yang terjadi diantara kelompok-kelompok tersebut.

Tugas sistem politik adalah menengahi konflik antar kelompok dengan cara:

- (1) Membuat aturan permainan dalam percaturan antar kelompok.
- (2) Mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan yang berbeda
- (3) Mewujudkan kompromi-kompromi tersebut dalam dengan kebijaksanaan negara.
- (4) Memaksakan berlakunya kompromi-kompromi bagi semua pihak.

Kelompok Penekan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi perubahan kebijaksanaan negara. Tingkat pengaruh kelompok Penekan tersebut ditentukan oleh jumlah anggotanya, harta kekayaannya, kekuatan dan kebaikan organisasinya, kepemimpinannya, hubungannya yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggotanya, dan sebagainya. Aktivitas politik dipandang oleh model ini sebagai hasil perjuangan kelompok, sehingga para pembuat kebijaksanaan Negara secara terus menerus memberikan respons terhadap tekanan-tekanan yang diberikan oleh kelompok tersebut, yaitu dengan melakukan tawar menawar, perjanjian dan kompromi terhadap persaingan tuntutan-tuntutan dari kelompok-kelompok yang berpengaruh.

Sistem politik yang juga merupakan keseluruhan sistem kelompok Penekan selalu berusaha untuk menciptakan keseimbangan diantara kekuatan yang ada pada sub-sub sistemnya. Dengan adanya kelompok laten yang besar dan kuat selalu berusaha untuk memelihara keseimbangan yang ada dan menjaga kalau ada kelompok-kelompok lain yang akan merusak atau mengancam keseimbangan

tersebut. Disamping itu karena adanya anggota-anggota kelompok yang merangkap menjadi anggota kelompok yang lain, maka hal inipun akan ikut memelihara adanya keseimbangan tadi. Dan juga sistem atau mekanisme “*checks and balances*” yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang bersaing akan ikut berperan juga dalam memelihara keseimbangan perjuangan kelompok-kelompok Penekan tersebut. Jadi kesimpulannya, kebijaksanaan negara, menurut model ini adalah merupakan keseimbangan yang dicapai dari perjuangan kelompok yang berbeda-beda.

Hague membagi kelompok Penekan kedalam kelompok yakni pendapat masyarakat, kebijakan pemerintah (*policy*) dan Partner. Antara pemerintah dan kelompok Penekan memiliki aktivitas yang berbeda. Dari kelompok Penekan tersebut dia menyatakan ada dua hubungan yang terpisah, yakni secara langsung dan secara tidak langsung.¹⁶

Saluran langsung merupakan mekanisme yang digunakan kelompok Penekan untuk mempengaruhi pemerintah tanpa melibatkan pihak lain, saluran langsung dapat berupa petisi pribadi kepada pemerintah seperti aksi demonstrasi, protes dan sebagainya. Sedangkan saluran tidak langsung merupakan saluran yang digunakan melalui kerjasama atau dengan cara melibatkan pihak lain. Kelompok Penekan yang memiliki visi dan misi yang sama atau medoa massa.

Sama dengan kelompok Penekan pada umumnya, Greenpeace juga menggunakan saluran khusus untuk menyalurkan aspirasi mereka. Saluran untuk

¹⁶ Rob Hogue, Martin Harrop, Shawn B Reslin, ,1988, *Comparative Governmnet and Politics: an introduction (4th edition)*: New Jersey: Prantice Hall. Hal 117

menyatakan pendapat dalam masyarakat berpengaruh besar dalam menentukan luasnya dan efektifnya tuntutan kelompok Penekan. Saluran-saluran paling penting adalah sebagai berikut dalam menyuarakan menurut Hogue dilakukan dengan berbagai sarana seperti :

- (1) Demonstrasi dan tindakan kekerasan. Demonstrasi dan tindakan kekerasan ini merupakan salah satu sarana untuk menyatakan tuntutan/Penekanan. Sarana ini banyak dipergunakan oleh kelompok anomik.
- (2) Hubungan Pribadi, adalah salah satu sarana penyampaian Penekanan melalui media keluarga, sekolah, hubungan kedaerahan sebagai perantara kepada elit politik.
- (3) Perwakilan Langsung, sarana artikulasi dan agregasi Penekanan yang bersifat resmi, seperti, legislative, eksekutif dan yudikatif serta lembaga resmi lainnya.
- (4) Saluran Formal dan Institusional lain. Sarana artikulasi yang meliputi antara lain media massa cetak, elektronik, televisi (formal) dan partai politik (Institusional) lainnya.

Selain itu *pressure group* melakukannya melalui tindakan tidak langsung. Tindakan ini mereka lakukan untuk menyatakan tuntutan atau Penekanan. Sarana ini sering digunakan oleh kelompok anomik. Hubungan individu dengan melalui hubungan keluarga ataupun dengan perantara kepada elit politik juga dilakukan demi mencapai tujuan kelompok mereka. Dan satu hal yang dilakukan oleh kelompok Penekanan yang sering dilakukan adalah melalui jalur resmi

pemerintahan seperti badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, mereka meyarakan tuntutan secara legal action, untuk menerima tuntutan mereka. Namun umumnya tuntutan ini banyak tidak dikabulkan karena tuntutan yang kurang rasional dan hanya memenuhi keinginan dan Penekan kelompok tertentu saja yang tidak berdampak langsung hasilnya kepada publik secara umum.

Saluran yang digunakan *Greenpeace* dalam menyuarakan tuntutan dan keinginan-keinginan mereka dilakukan dengan Saluran langsung diantaranya :

a. Perwakilan langsung melalui lobi dan tuntutan di Pemerintahan

Perwakilan langsung merupakan sarana yang memungkinkan suatu kelompok Penekan untuk memngkomunikasikan secara langsung Penekan-Penekannya melalui seorang anggota aktif dalam struktur pembuatan keputusan. Dalam hal ini anggota-anggota *Greenpeace* sendiri menjadi anggota langsung di Departemen atau Bagian Pemerintahan. Anggota-anggota tersebut juga berhubungan sehari-hari dengan para pembuat keputusan yang memungkinkan mereka untuj melakukan *lobbying* terhadap pemerintah.

Dengan adanya konsep tersebut maka posisi *Greenpeace* bisa dijelaskan sebagai sumber *interest group* yang memiliki hak dan legitimasi untuk melakkan *lobbying* terhdapa Pemerintah Australia. Hal tersebut dimaksudkan agar *Greenpeace* dapat memiliki pengaruh dalam melakukan kebijakan pemerintah sehingga Penekannya terakomodasi.

b. Demonstrasi dan Aksi-aksi

Pengungkapan aksi-aksi publik dengan cara parade atau pertemuan massal, juga dilakukan *Greenpeace*. *Greenpeace* mengajak massa untuk menyampaikan tuntutan mereka, hal ini dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Greenpeace menggunakan strategi ini untuk mengkomunikasikan tuntutannya. Strategi ini disebut "*bear witness*" (*a quaker tradition of silent protest*), yaitu suatu tindakan yang dilakukan *Greenpeace* untuk menjadikan dirinya sebagai saksi atas terjadinya perbuatan-perbuatan atau tindakan yang merusak lingkungan.

Penekan atau kebijakan yang tidak langsung disampaikan individu kepada anggota parlemen, dewan kota atau pejabat pemerintahan, atau secara tradisional kepada kepala suku atau kepala desa. Secara langsung menyatakan bahwa kebijakan dilakukan melalui pemilihan politik dan berbeda dengan yang terjadi pada kelompok Penekan yang lebih mengandalkan kekuatan dan dukungan untuk mengontrol dan melindungi kelompok mereka.

Secara tidak langsung kelompok Penekan melakukannya dengan upaya memengaruhi pada rezim pemerintah dan partai politik, dengan cara melakukan pendekatan dan hubungan yang terbuka. Disamping itu kelompok Penekan juga membangun opini pada media massa, yakni melalui radio, surat kabar, televisi dan sebagainya. Upaya tidak langsung ini sebenarnya hanya memberikan informasi kepada publik akan program dan tuntutan mereka.

Saluran tidak langsung yang digunakan *Greenpeace* adalah dengan menggunakan saluran :

a. Media Massa

Greenpeace menggunakan sistem politik modern dalam mengkomunikasikan Penekannya. Salah satunya adalah dengan media massa, surat kabar, televisi, majalah dan radio. Media massa adalah saluran utama tuntutan politik dan sarana mencapai pembuatan keputusan dalam masyarakat terbuka.

b. Kerjasama dengan kelompok kepentingan lainnya

Dalam hal ini *Greenpeace* juga bekerjasama dengan kelompok-kelompok lingkungan hidup lainnya, khususnya kelompok Penekan lingkungan dalam bidang kelautan. Dalam menyuarakan Penekan dan keinginan-keinginan terhadap pelestarian lingkungan kehidupan di bidang kelautan.

Dalam membangun opini kepada publik, kelompok Penekan tidak segan melakukannya dengan menyampaikan kelemahan pemerintah maupun badan legislatif. Mereka umumnya menyalahkan dan menyudutkan kebijakan yang dilakukan namun kurang memberikan alternatif jalan keluar. Dengan langkah seperti ini umumnya masyarakat atau publik banyak terpengaruh dengan *campaign* atau kampanye yang mereka lakukan melalui media massa.

Disamping itu kelompok Penekan umumnya menjalin hubungan dengan partai politik yang ada. Partai politik yang diajak bekerjasama biasanya adalah kelompok oposisi atau partai yang sejalan dengan visi kelompok Penekan

mereka. Perjuangan yang mereka lakukan ini dilakukan dalam jangka pendek, karena Penekan tertentu, misalnya menekan pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan kesejahteraan kaum buruh dan marjinal, isu penyelamatan lingkungan dan sebagainya. Hal ini mereka lakukan untuk memperkenalkan program dan upaya mereka dalam tindakan yang diambil maupun dalam upaya mempengaruhi opini agar pemerintah dapat mengikuti kehendak dan kebijakan mereka.

Dalam melaksanakan aksinya untuk mempengaruhi kebijakan terhadap Pemerintah Asutralia, *greenpeace* menggunakan saluran media secara langsung dan tidak langsung demi mencapai tujuan organisasi mereka. Hal ini mereka lakukan selain untuk menarik simpati masyarakat juga melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Australia yang tidak sejalan dengan visi organisasinya.

Dalam penerapan teori *pressure group* dalam penelitian ini Greenpece bertindak sebagai NGO yang berafiliasi pada Greenpece Internasional mempunyai visi untuk menyelamatkan lingkungan baik udara, air dan hutan. Dalam kegiatannya greenpece melakukan aksi-aksi langsung maupun tidak langsung untuk menacapai tujuan organisasi dengan melakukan tekanan pada pemerintah baik melalui parlemen maupun melalui pemerintah federal.

E. Hipotesa

Dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah dan perumusan masalah, hipotesa dalam penelitian ini adalah

Secara langsung : *Greenpeace* melakukan upaya perlawanan secara damai dalam bentuk demo, aksi-aksi atau tuntutan kepada pemerintahan Kevin Rudd terhadap kebijakan lingkungan yang sudah dilaksanakan.

Secara Tidak langsung : *Greenpeace* sebagai organisasi internasional (*non government organization*) berhasil mempengaruhi dan meyakinkan pemerintahan Kevin Rudd dalam menerapkan kebijakan lingkungan di Australia. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan lobi politik di tingkat parlemen dan melalui organisasi Penekan lainnya.

Greenpeace untuk mempengaruhi kebijakan lingkungan melakukan dengan kontak-kontak pribadi dengan pembuat undang-undang dan para menteri kabinet atau pada kepala pemerintahan. Usaha ini ditindak lanjuti dengan mengundang para anggota legislatif maupun eksekutif dalam sebuah acara.

Mengirim memo maupun press release, dan perwakilan *Greenpeace* ke kelompok-kelompok parlementer, komisi-komisi pemerintahan dan para menteri negara. Melancarkan tekanannya dalam hal pembiayaan dan pemberian bantuan materi kepada para anggota Legislatif. Dengan disusul kunjungan langsung ke Pemerintah Federal oleh para pelobi *Greenpeace* guna menekankan pengaruhnya secara afirmatif. Pengadaan kombinasi lobi *Greenpeace* dengan lobi kelompok penekan lainnya di Legislatif mendorong suksesnya pengesahan Undang Undang yang mengatur lingkungan.

F. Metode Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Metode ini digunakan untuk menjelaskan dan menafsirkan data-data yang didapatkan. Dengan metode ini akan dilakukan sebuah representasi obyektif terhadap fenomena atau data yang ada. Obyektifitas yang dimaksud adalah suatu proses untuk menghindari subyektifitas yang berlebihan karena pada dasarnya tidak ada suatu obyektifitas yang mutlak. Sehingga perlu adanya pengawasan diri secara mandiri agar peneliti tidak bertindak untuk menafsirkan data dengan subyektif secara berlebihan.¹⁷

Menurut Barton dan Lazarfed terdapat empat hal penting: *Pertama*, eksplorasi, yang akan membantu peneliti untuk menganalisa objek, mengidentifikasi indikator-indikator, dan menciptakan klasifikasi dan tipologi-tipologi. *Kedua*, menemukan pola hubungan antar variable, memungkinkan perbandingan dan pembuatan kesimpulan tentang faktor-faktor tertentu dan hubungan-hubungan yang signifikan. *Ketiga*, menciptakan konstruksi yang terintegrasi. *Keempat*, melakukan uji hipotesis.

Secara umum penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam pelaksanaannya. Penelitian kualitatif merujuk pada beberapa

¹⁷ Surakhmad, Winarno. 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode teknik*. TARSITO. Bandung.. hal. 140-141.

pendekatan metodologis didasarkan pada prinsip-prinsip teoritis yang berbeda. Penelitian kualitatif biasanya menerapkan metode pengumpulan dan analisa data yang bersifat non-kuantitatif, dan dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi tentang hubungan-hubungan sosial, dan mendeskripsikan realitas sosial.

2. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan melakukan studi pustaka atau *library research*, yaitu penelitian melalui buku, jurnal, media massa, skripsi-skripsi yang telah ditulis sebelumnya, internet, dan media elektronik serta data-data dari sumber-sumber yang relevan lainnya.

3. Teknik Analisa Data

Interpretasi dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dimana data-data yang didapat baik berupa perkataan maupun angka-angka yang masih berupa data mentah akan terlebih dahulu melalui proses seleksi, dan diambil intinya kemudian data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan yang kemudian dijabarkan dan dihubungkan dan kemudian disusun kembali sehingga mampu mendeskripsikan keadaan variabel-variabel dalam penelitian dan perkembangannya yang terjadi dan terakhir menarik kesimpulan atau verifikasi atas pola keteraturan dan penyimpangan-penyimpangan yang

ada dalam fenomena-fenomena tersebut kemudian membuat prediksi atas kemungkinan perkembangan selanjutnya.

G. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang membuat *Greenpeace* dapat mempengaruhi kebijakan lingkungan pemerintahan Kevin Rudd.
2. Untuk mengetahui Kebijakan apa yang telah dilakukan Pemerintahan Kevin Ruud khususnya dalam kebijakan Lingkungan di Australia.

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis mengambil jangkauan penelitian dari awal kampanye Kevin Ruud tahun 2007 hingga pemerintahan Kevin Ruud saat ini berkuasa (Juni 2010).

Pada Tahun 2007 Ruud menandatangani Protokol Kyoto, Tahun 2008 meratifikasi Prtokol Kyoto dalam bentuk Undang Undang, Tahun 2009 Legislatif menentang usulan penurunan emisi dan Tahun 2010 terjadi perpecahan pada koalisi Partai Buruh (ALP, Australian Labour Party).

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan, akan dibahas mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen pokok, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan. Adapun rencana sistematika penulisannya adalah :

- A. Alasan Pemilihan Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Hipotesa
- F. Metode Penelitian
- G. Tujuan Penelitian
- H. Jangkauan Penelitian
- I. Sistematika Penulisan

Bab II, Greenpeace Australia Terdiri dari :

- A. Greenpeace International
- B. Greenpeace Australia

Bab III, Dinamika Politik dan kebijakan lingkungan Australia, pada bab ini disampaikan Dinamika politik yang terjadi pada pemerintahan Kevin Rudd dalam kebijakan lingkungannya.

- A. Dinamika Politik Australia dalam Masalah Kebijakan Lingkungan
- B. Kiprah Greenpeace Australia
- C. Dinamika Perbandingan di Eropa (kasus Green Party)

Bab IV, Tekanan Greenpeace melalui Saluran Tidak langsung dan Melalui Saluran Langsung. Pada bab ini akan dibahas Upaya Greenpeace dalam mempengaruhi kebijakan lingkungan Australia melalui saluran tidak langsung. Terdiri dari :

Tekanan Greenpeace. Peran Akan membahas upaya *Greenpeace* dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan lingkungan Australia melalui saluran langsung. Pada Bab ini terdiri dari :

- A. Tekanan Melalui Saluran Langsung
- B. Tekanan Melalui Saluran Tidak langsung

Bab V Kesimpulan